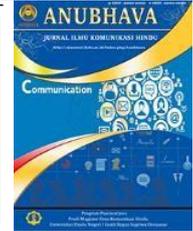




Contents list available at [Anubhava](http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/anubhava)

JURNAL ILMU KOMUNIKASI HINDU

Journal Homepage <http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/anubhava>



STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DALAM PENCITRAAN PARTAIPOLITIK DAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Di KABUPATEN BANYUWANGI

Putra Hari Iryanto ^{a,1}
Relin D.E^b
I Nyoman Ananda^c

^{a,b,c}Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

¹Corresponding Author, email: putrahari2018@gmail.com (Iryanto)

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 08-07-2024

Revised: 06-08-2024

Accepted: 02-09-2024

Published: 30-09-2024

Keywords:

Political Communication, Image, Political Parties, Legislative Candidates, General Election.

ABSTRACT

The arrangement of party images in this thought is taken from research consideration of cases of political communication methodology carried out by the Party and administrative candidates ahead of the administrative race contestation in Banyuwangi Government in 2024 with one central point in the DAPIL V area includes the Tegalsari Region, Gambiran Region and Cluring Region. Now, they are eager to make their presence known and shape the image as something unused reformist authoritative parties and candidates who are equal to other parties, get the thinking the efforts of the Party and its authoritative candidates to shape a modern image or an old-fashioned party. The problem detailed in this question is as follows: (1) How is the situation political communication in the image of political parties and administrative candidates in the 2024 joint decision in the Banyuwangi Regional Regulations?. (2) What is the function of political communication in the image of political parties and legislative candidates in the 2024 Election in the Banyuwangi Government?. (3) What is its political communication suggestions in the picture of political parties and an authoritative candidate in the 2024 joint decision in the Banyuwangi Regional Regulations?. The hypothesis used to analyze the problem is the Motivational Setting Hypothesis, Constructivist Hypothesis, Explanatory Hypothesis. Information was collected using non-participant perception procedures, in-depth interviews, documentation studies, and written thoughts, witnesses are selected using deliberate examination and technique of investigating subjective graphic information with the method of deriving, information introduction, and draw conclusions. Based on information searches, it was found: (1) Forms of Political Communication in the Description of Political Parties and the Legislature Candidates in the 2024 General Decision in Banyuwangi Regency. (2) Employment Political Communication in the Image of Political Parties and Administration Candidate in the 2024 Common Race in Banyuwangi Regency. (3) Suggestions Political Communication in the Image of political Parties and Administration Candidates in the 2024 General Decision in Banyuwangi Regency.

PENDAHULUAN

Kerangka di negara-negara totaliter, kapasitas perkumpulan ideologis sebagai satu-satunya pendorong yang berperan terbesar dalam mendukung tujuan filosofis partai dan kapasitasnya sebagai instrumen untuk mewujudkan solidaritas dan konsistensi (Budiardjo, 2005: 5.36). Partai politik juga diartikan sebagai “organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia yang dengan sengaja berdasarkan kemauan dan persamaan untuk memperjuangkan antarmuka individu, masyarakat, negara, dan negara melalui kesamaan ras”. dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002. Berdasarkan pengertian partai politik, ada tiga standar dasar. Pesta sebagai penggabungan adalah langkah utama yang memerlukan penyatuan antarmuka yang berbeda untuk membuat sebagian besar menjalankan pertunjukan.

Pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi dari masa ke masa terus mengaami perbaikan yang cenderung besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perbaikan di berbagai lapisan masyarakat. Tentu saja, upaya untuk melaksanakan pemerintahan yang baik akan dipengaruhi oleh pendekatan politik kelompok politik kelas satu. Menjelang pemilu tahun 2024, berbagai kelompok elit politik mulai dari partai politik dan kandidat yang memiliki otoritas mengharapkan gambaran positif di masyarakat. Melalui berbagai strategi, upaya dilakukan untuk menyampaikan pertimbangan, pemikiran, dan janji pada acara yang dipilih pada pemilu 2024 dengan keyakinan bahwa masyarakat akan bersedia memberikansuaranya.

Terpeliharanya hubungan partai politik dengan masyarakat juga akan menentukan kehadirannya, karena kedekatan ini akan membangun kepercayaan konstituen. Masyarakat terbuka akan lebih menghargai gambaran positif partai dibandingkan besarnya partai tersebut di mata masyarakat terbuka. Ketika sebuah kelompok ideologis mempunyai kemauan dan konsisten dalam menyuarakan keinginan konstituennya, khususnya membela unsur-unsur dan kebutuhan esensial masyarakat, maka pada saat itulah kepercayaan

terhadap partai akan terbangun. Pendukung akan terus berkembang dan tentu saja gambaran kelompok ideologis akan maju jika upaya ini terus berlanjut. Anggota parlemen dan pemimpin partai sangat tertarik memanfaatkan komunikasi politik untuk memperluas gambaran politik dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai soliditas sosial. Para pembuat undang-undang dan pionir partai berupaya membangun dan menjaga kegiatan-kegiatan politik yang mencerminkan gambaran positif dengan cara memobilisasi kelompok-kelompok pengamat komunikasi politik yang terbuka dan akan menentukan pilihannya dalam setiap keputusan di tingkat daerah, kota, dan pusat (Budiardjo, 2005:25).

Susunan gambar partai dalam penelitian ini diambil dari penelusuran kasus merenungkan teknik komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai dan calon pengurus menjelang kontestasi keputusan resmi dalam Peraturan Daerah Banyuwangi Tahun 2024 dengan satu titik pusat di dalamnya. Daerah DAPIL V yang meliputi Daerah Tegalsari, Daerah Gambiran dan Kecamatan Cluring. Saat ini ada keinginan untuk menunjukkan kehadirannya dan menjadikan dirinya sebagai partai tak terpakai yang sebanding dengan partai lain dan calon administratif reformis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang upaya partai-partai dan kandidat yang berwenang dalam mengantisipasi gambaran modern, energik, mutakhir dan mendunia dari fenomena ini.

Berdasarkan landasan di atas, definisi masalah dalam pertanyaan ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana kiprah komunikasi politik dalam gambaran partai politik dan calon pengurus dalam Keputusan Bersama 2024 di Peraturan Daerah Banyuwangi? 2. Apa fungsi komunikasi politik dalam gambaran partai politik dan kandidat yang berwenang? dalam Pemilu 2024 di Banyuwangi?, 3. Apa Dampak Komunikasi Politik dalam Gambaran Partai Politik dan Calon Administratif dalam Pemilu 2024 di Banyuwangi? Intisari dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan Metodologi Komunikasi Politik dalam Gambaran Partai Politik dan Calon Berwenang

dalam Putusan Umum 2024 di Peraturan Daerah Banyuwangi. Tujuan khusus dari pertanyaan ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dirinci dalam pertanyaan ini, dengan menghitung: a) Untuk mengetahui dan menganalisis cara kerja Komunikasi Politik dalam Pencitraan Partai Politik dan Calon Administratif pada Pemilu 2024 di Pemerintahan Banyuwangi. b) Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Komunikasi Politik dalam Gambaran Partai Politik dan Kandidat Berwenang pada Pemilu 2024 di Pemerintahan Banyuwangi. c) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh penggunaan Komunikasi Politik dalam Pencitraan Partai Politik dan Calon Administratif dalam Putusan Umum Tahun 2024 di Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Menurut Kriyantono (2020:115), spekulasi dan penyelidikan tentang penemuan merupakan hasil dari pandangan atau tinjauan logis dari berbagai sumber logis. Analisis memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya sebagai acuan dalam menyusun proposal ini dan menemukan penelitian yang tidak digunakan. Hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: Muchtar Khoiruddin (2016) dalam buku harian berjudul Komunikasi Politik dan Penataan Gambar Partai dalam Eksistensi dan Citra Partai Melalui Pidato Politik Ketua Umum, Syahputra (2018) dalam jurnal Tata Cara Hubungan Media Perusahaan Tambang Timah dan Rencana Pengaturan Media di Bangka Belitung, Saraswati dkk (2019) dalam buku harian berjudul Latihan Hubungan Media pada Direktorat Komunikasi Terbuka Perguruan Tinggi Padjadjaran menyelidiki tahapan strategi komunikasi yang dilakukan Universitas Padjadjaran dalam program Reacting Unpad, Lampe Ilyas (2014) dalam Etnis Kepribadian dalam Komunikasi Politik dalam Judul Keluarga (Marga) Sebagai Citra Karakter Politik Bangkitnya Hubungan Keluarga Persoalan Legislatif, Awaludin Pimay (2019) dalam buku harian berjudul Teknik Komunikasi Politik bagi Individu Administratif Terpilih Partai Kebangkitan Bangsa dalam Lomba 2019 di Salatiga.

Konsep dapat berupa gambaran umum

tentang keadaan suatu peristiwa. Kriyantono (2010:17) menyatakan bahwa konsep dapat berupa istilah yang mengkomunikasikan pemikiran unik yang dibentuk dengan menggeneralisasi objek atau hubungan atau kebenaran yang diperoleh dari persepsi. Konsep dibuat dengan mengelompokkan dan mengumpulkan objek-objek tertentu yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Penelitian ini menggambarkan konsep yang telah disinggung di atas dalam pengertian dengan judul yaitu "Prosedur Komunikasi dalam Pencitraan Partai Politik dan Calon Legislatif pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi" dengan konsep: **Komunikasi Politik, Simbolisme, Partai Politik, Calon Administratif, Keputusan Bersama.**

Hipotesis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah Hipotesis Penetapan Motivasi, Hipotesis Konstruktivis, Hipotesis Penjelasan. Informasi dikumpulkan dengan menggunakan metode persepsi non partisipan, wawancara mendalam, pemikiran dokumentasi, dan pemikiran tertulis, sumber dipilih dengan menggunakan metode penelitian purposive dan penyelidikan informasi yang jelas subjektif dengan prosedur reduksi, pengenalan informasi, dan menarik kesimpulan. Berdasarkan penelusuran data ditemukan: (1) Bentuk Komunikasi Politik dalam Gambaran Partai Politik dan Calon Administratif dalam Keputusan Bersama Tahun 2024 di Peraturan Daerah Banyuwangi. (2) Kerja Komunikasi Politik dalam Citra Partai Politik dan Kandidat Berwenang pada Pemilu 2024 di Pemerintahan Banyuwangi. (3) Dampak Komunikasi Politik dalam Gambaran Partai Politik dan Calon Legislatif dalam Keputusan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi.

METODE PENELITIAN

Penelitian Ini menyelidiki pertanyaan subjektif tentang pekerjaan. Sependapat dengan Kriyantono (2021), penyelidikan subjektif bertujuan untuk menemukan dan memahami struktur dan implikasi yang terjadi dalam hubungan intuitif dan komunikasi dalam lingkungan umum. Sifat penyelidikan ini bersifat grafis. Pertanyaan yang jelas tentang hal-hal untuk menciptakan gambaran

yang teratur, asli dan tepat tentang peristiwa dan karakteristik suatu masyarakat atau daerah tertentu (Pujileksono, 2015:19). Dalam penelitiannya, analis menggunakan pandangan dunia konstruktivis. Paradigma konstruktivis menganggap realitas yang dibentuk oleh berbagai mimpi yang berbeda-beda sebagai kerangka konstruksi realitas tersebut. Realitas yang dijadikan bahan protes untuk bertanya adalah aktivitas sosial para subjek sosial (Pujileksono, 2015:28). Untuk mengajukan pertanyaan tentang proposisi subjek, menyampaikan analisis yang belum terpakai berdasarkan spekulasi sebagai motivasi dan menemukan hipotesis baru, langkah yang harus diambil adalah mengumpulkan sebanyak mungkin jalinan yang dapat dibayangkan, dalam bingkai buku, menyelidiki kejadian-kejadian, karya-karya logis.

Laporan dan artikel tambahan serta salinan asli berdasarkan wawancara koordinatif dengan sumber dan catatan. Peninjauan tersebut dilakukan di wilayah Banyuwangi, tepatnya di DAPIL Daerah V (Daerah Peruntukan V) yang meliputi Daerah Tegalsari, Daerah Gambiran dan Daerah Cluring. Analis melakukan investigasi selama 5 bulan, tepatnya Januari hingga April 2024. Periode ini meliputi perencanaan penyelidikan proposisi, pengumpulan informasi, analisis informasi, dan penyusunan hasil penelitian. Penyelidikan tentang daerah dipilih karena daerah ini telah mendapat predikat sebagai lembaga pemerintahan terbaik dalam mengatur pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, para analis memilih partai politik dan kandidat yang mempunyai otoritas sebagai subyek penelitian, dengan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah penelitiannya. Informasi terbanyak untuk penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara mendalam terhadap narasumber dan responden. Wawancara dan persepsi dilakukan secara tatap muka pada bulan Januari hingga April 2024. Informasi penunjang dalam penyelidikan ini berupa informasi pendukung seperti arsip, penyelidikan kantor dan dokumen referensi lainnya. Penyajian informasi membuat analis

berbeda memahami apa yang terjadi dan melakukan pemeriksaan bantuan. Pengenalan informasi yang hebat memajukan penyelidikan informasi subjektif melalui cerita ekspresif dan pengenalan data visual yang lebih terkini (Miles, Huberman, dan Saldana dalam Kriyantono, 2020:360). Penelitian ini menggunakan strategi informasi berupa isi laporan yang dilengkapi dengan grafik atau table untuk mendukung pengenalan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Lokasi Penelitian.

Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2023, tidak ada perubahan dalam penetapan lokasi DPRD Banyuwangi. Wajar jika daerah penunjukannya bertambah menjadi 8 daerah konstituen. Daerah Konstituen 1 Banyuwangi mempunyai 6 kursi yang terdiri dari Daerah Kabat, Daerah Glagah dan Pemerintahan Banyuwangi. Daerah diskresi Banyuwangi 2 meliputi Daerah Srono, Daerah Rogojampi dan Daerah Blimbingsari. Untuk sementara, jumlah kursi yang dibagikan tetap sama, yaitu 6 kursi. Daerah konstituen Banyuwangi 3 terdiri dari dua kecamatan, Tegaldimo dan Muncar. Jumlah kursi di setiap daerah konstituen dipisahkan menjadi 6 kursi. Daerah Pengangkatan 4 Banyuwangi terdiri dari empat kecamatan, meliputi Kecamatan Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, dan Siliragung dengan jatah 7 kursi DPRD. Lainnya, Daerah Pelantikan 5 Banyuwangi meliputi Kawasan Cluring, Kawasan Gambiran, dan Kawasan Tegalsari dengan peruntukan 6 kursi. Lainnya adalah Kawasan Diskresi 6 Banyuwangi yang meliputi Kawasan Genteng, Lokal Glenmore, dan Lokal Kalibaru. Sementara jumlah kursi yang tersebar sebanyak 7 kursi. Daerah diskresi Banyuwangi 7 yang masih mencakup tiga kecamatan, yakni Kawasan Singojuruh, Lokal Songgon, dan Kawasan Sempu mendapat 6 kursi. Terakhir, Daerah Diskresi Banyuwangi 8 meliputi Daerah Giri, Daerah Wongsorejo, Daerah Kalipuro, dan Daerah Licin dengan perolehan 6 kursi (PKPU Nomor 6 Tahun 2023). Dalam penelitian

ini, penulis memilih penelusuran mengenai kawasan yang termasuk dalam Daerah Perwalian Banyuwangi (DAPIL) V yang meliputi Daerah Cluring, Daerah Gambiran, dan Daerah Tegalsari. Penelusuran dan pengumpulan informasi dilakukan selama kurang lebih tiga bulan, tepatnya pada bulan Februari hingga April. Dalam rangka pengumpulan informasi dalam penyelidikan ini, pencipta membedakan beberapa kotayang mewakili setiap kecamatan di Wilayah Diskresioner V. Tujuan identifikasi lokasi yang dipilih peneliti adalah untuk memudahkan memudahkan proses pengumpulan data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini adalah tiga desa di tiga kecamatan Daerah Pemilihan V, antara lain:

1. Desa Karangdoro di Kecamatan Tegalsari

Keadaan Wilayah dan Geografi Desa Karangdoro merupakan salah satu desa yang ada di daerah kecamatan Tegalsari dan merupakan wilayah kabupaten Banyuwangi. Desa karangdoro bisa dikatakan daerah yang cukup luas, karena luas wilayah ini ± 2.643,3 Km². Wilayah ini merupakan dataran dengan luas 699.287 Ha, untuk luas pemukiman 2,960,45 ha, luas persawahan 221,48 ha, berada pada ketinggian 500 m dari permukaan air laut, dengan curah hujan 2500 Mmtahun, dan suhu udara rata - rata 32 o C. Desa ini terletak di daerah bagian Selatan kota Banyuwangi yang dilihat dari orbitasi jarak ke pusat pemerintahan kabupaten adalah 52 Km.

2. Desa Wringinagung di Kecamatan Gambiran

Desa Wringinagung memiliki Luas Wilayah 6.157 Ha sekitar 81,65 % berupa Lahan Pertanian, yang terdiri dari sawah, tegalan, sawah tadah hujan, dan sekitar 18,35 % adalah jalan, tempat tinggal dan fasilitas lainnya (Sumber : Profil Desa 2016). Topografi Desa Wringinagung berupa dataran sedang dengan suhu udara 33 0C, ketinggian rata - rata dari permukaan air laut + 50 m dpl, sedangkan curah hujan rata - rata tiap tahun berkisar 1000mm-2000 mm³, dengan demikian kondisi alam Desa

Wringinagung cukup sejuk. (Sumber : Profil Desa 2016).

3. Desa Sembulung di Kecamatan Cluring.

Secara geografis Desa Sembulung Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi terletak di antara dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Gambiran dan Kecamatan Purwoharjo. Luas Wilayah 7.260.000 M Penggunaannya untuk Sawah 4.225.00 M, Tegal 793.000 M, pemukiman, pekarangan, jalan dll. 2.242.000 M (Profil Desa Sembulung: 2016).

Komunikasi Politik dalam Pencitraan Partai Politik dan Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi.

Pengertian Komunikasi Politik Mendefinisikan komunikasi politik memang tidak cukup hanya dengan menggabungkan dua definisi, "komunikasi" dan "politik". Terdapat konsep tersendiri, meskipun secara sederhana merupakan gabungan dari dua konsep tersebut. Komunikasi dan politik dalam wacana ilmu pengetahuan manusia merupakan dua wilayah pencarian yang masing-masing dapat dikatakan relatif berdiri sendiri. Namun keduanya memiliki kesamaan-kesamaan sebab memiliki objek material yang sama yaitu manusia. Kesamaan objek material ini membuat kedua disiplin ilmu itu tidak dapat menghindari adanya pertemuan bidang kajian. Hal ini disebabkan karena masing-masing memiliki sifat interdisipliner, yakni sifat yang memungkinkan setiap disiplin ilmu membuka isolasinya dan mengembangkan kajian kontekstualnya (Syarbaini : 2021). Komunikasi mengembangkan bidang kajiannya yang beririsan dengan disiplin ilmu lain, seperti sosiologi dan psikologi, dan hal yang sama berlaku pula pada ilmu politik. Komunikasi politik secara keseluruhan tidak bisa dipaham tanpa menghubungkannya dengan dimensi-dimensi politik serta dengan segala aspek dan problematikanya. Kesulitan dalam mendefinisikan komunikasi politik terutama dipengaruhi oleh keragaman sudut pandang terhadap kompleksitas realitas sehari-hari. Komunikasi dipahami secara sederhana sebagai proses penyampaian pesan,

dengan demikian komunikasi politik berarti proses penyampaian pesan-pesan politik. Berkenaan dengan hal ini, sebelum memahami konsep dasar komunikasi politik, perlu terlebih dahulu ditelusuri pengertian politik paling tidak dalam konteks yang menjadi masalah penelitian ini.

Tujuan komunikasi politik adalah membuat gambaran dengan menetapkan motivasi yang jelas. Agenda publik dapat memperkuat sesuatu yang dianggap kritis oleh produsen pilihan terbuka (open motivasi). Hipotesis penetapan rencana ditemukan oleh McComb dan Donald L. Shaw. Teori ini berasumsi bahwa media mempunyai kapasitas untuk mengkomunikasikan isu-isu yang berdampak pada motivasi terbuka. Pihak yang terbuka akan menganggapnya penting karena elit politik dan media menganggap isu tersebut penting (Kriyantono, 2014:324). Senada dengan Kriyantono (2014:325), hipotesis penetapan motivasi dapat menjadi premis bagi hubungan terbuka untuk membuat program yang dapat berdampak pada media plan. Hal ini berarti bahwa program hubungan terbuka selalu dijamin oleh media karena dianggap penting. Sumber pemberitaan media adalah data yang diberikan melalui hubungan terbuka dan perencanaan kepada media. Dalam setting hubungan terbuka, hipotesis pengaturan motivasi ini dapat diperluas dengan mengkaji pegangan pengaturan media plan dan rencana hubungan terbuka (plan building).

Perkembangan hipotesis ini berangkat dari anggapan bahwa open Relations harus proaktif dalam memberikan data dan tentunya mempengaruhi media dan open plan. Maksudnya menyebarkan pemikiran organisasi secara terbuka melalui pemberian data (informasi sponsorship), seperti press release, konferensi pers dan sejenisnya. Hal ini juga dapat mendorong peningkatan hubungan baik antara hubungan terbuka dan media. Para profesional hubungan terbuka harus melihat media sebagai kaki tangan dalam menyebarkan data ke seluruh organisasi. Upaya tersebut disebut dengan publikasi, yaitu pesan-pesan yang disusun, diaktualisasikan, dan disampaikan melalui media massa untuk

memenuhi antarmuka masyarakat tanpa harus membayar media tersebut (Kriyantono, 2014:326).

Melalui sejumlah pertimbangan yang diambil dari hipotesis pembangun motivasi dan berdasarkan kesimpulan para ahli atas kesesuaian dengan fenomena yang terjadi dalam kenyataan. Cara menyampaikan data kepada partai politik dan memenangkan kandidat dalam pengambilan keputusan administratif sangat dipengaruhi oleh penggunaan media. Media massa dan media sosial akan sangat mempengaruhi tingkat kemenangan dalam menciptakan rencana tertentu di masyarakat. Dalam penelitian ini, komunikasi politik antara calon legislatif dan partai politik bertujuan untuk menciptakan sebuah agenda untuk membentuk gambaran besar di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik dapat menjadi teknik visualisasi partai politik dan kandidat yang mempunyai otoritas dalam pengambilan keputusan administrasi tahun 2024 di daerah B anyuwangi.

Fungsi Komunikasi Politik dalam Pencitraan Partai Politik dan Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi.

Tujuan komunikasi politik adalah untuk memberikan nilai edukasi dan informasi tentang dunia politik kepada khalayak melalui berbagai media. Penyampaian pesan dari komunikator politik ke khalayak tentu memberikan efek- efek politik. Efek merupakan suatu penerimaan atau respon dari khalayak terhadap informasi yang diberikan oleh komunikator. Efek komunikasi politik adalah respon khalayak terhadap informasi politik yang disampaikan oleh komunikator politik. Efek ini disebut juga sebagai opini publik. Salah satu efek dalam komunikasi politik yang juga dianggap sebagai Efek Komunikasi Massa adalah efek kognitif, yaitu efek komunikasi politik yang berlangsung pada tingkat pemikiran. Efek ini bersifat informatif untuk diri khalayak. Seorang komunikator politik akan memberikan informasi tentang calon legislatif tersebut ke khalayak atau komunikan. Adanya proses komunikasi politik ini

menimbulkan efek seperti pengetahuan tentang calon legislatif memahami visi dan misinya serta khalayak dapat menilai calon legislatif ini mampu memberikan kesejahteraan khalayak/masyarakatnya. Adapun efek kognitif dari proses komunikasi politik adalah sebagai berikut Syarbaini,S (2021):

Pandangan konstruktivis tentang pertunjukan memiliki beberapaciri, antara lain: Realitas bersifat relatif, artinya realitas yang ada berkembang secara khusus dan bersifat lingkungan, subyektif, membuat informasi berdasarkan penemuan-penemuan di lapangan, menghitung penemuan- penemuan yang tercipta di tengah intuisi antara analisis dan penyedia data. Pemilihan saksi dalam penyidikan subjektif dilakukan berdasarkan kebutuhan atau keperluan penyidikan. Jean Piaget dikenal sebagai tokoh konstruktivis utama yang menjelaskan bahwa metode pengungkapan logis adalah metode orang menemukan dirinya ketika berkolaborasi dengan lingkungan. Seorang individu harus mampu mengkonstruksi informasi berdasarkan keterlibatan dan persepsinya (Firmanzah: 2011). Tujuan penggunaan hipotesis konstruktivis adalah untuk membeda tingkat utilitarian komunikasi politik terhadap gambaran partai politik dan calon legislative dalam pengambilan keputusan daerah pasca konflik tahun 2024 di Peraturan Daerah Banyuwangi.

Komunikasi politik adalah suatu kerangka pengaruh politik dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengkomunikasikan pemikiran dan tujuan politik dengan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Menyetujui hipotesis konstruktivis, semakin cepat data politik dalam suatu lingkungan sosial tercipta, semakin tinggi pula kemampuan untuk membentuk pemikiran setiap orang dalam lingkungan tersebut. Kapasitas komunikasi politik sebagai suatu bentuk prosedur untuk membangun rancangan pemikiran, inspirasi, kesimpulan dan tujuan dalam suatu pertemuan alamiah di suatu tempat. Melalui beberapa pemikiran dari hipotesis konstruktivis dan berdasarkan pandangan para ahli di atas sesuai dengan keajaiban yang terjadi di lapangan. Klarifikasi tersebut merupakan bagian dari

pekerjaan komunikasi politik penembakan parpoldan bakal calon anggota parlemen pada pemilu 2024 di Kabupaten Banyuwangi.

Implikasi Komunikasi Politik dalam Pencitraan Partai Politik dan Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi.

Sebagaimana dapat diketahui, terdapat efek komunikasi politik yang sebenarnya berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Komunikasi politik mempunyai peranan penting dalam menyampaikan sebuah aspirasi, pandangan, serta pengambilan kebijakan-kebijakan publik. Namun di kalangan masyarakat biasa, komunikasi politik diidentikan dengan kegiatan politik yang membosankan karena dianggap hanya dapat menguntungkan salah satu pihak saja dalam hal ini sebagai contoh adalah elite partai politik. Komunikasi politik merupakan hal yang mungkin akan menjadi sesuatu yang tidak memberikan minat bagi beberapa orang. Namun demikian, tetap saja komunikasi politik tersebut akan memiliki pengaruh tertentu. Dapat diidentifikasi bahwa yang dapat dipengaruhi baik secara langsung atau pun tidak langsung dari komunikasi politik ini.

Dalam perlombaan administrasi, setiap kandidat mensosialisasikan motivasinya melalui beberapa cara. Selain itu, melalui pengumuman, pamflet, materi khusus, latihan membaca ayat koordinatif, arisan arisan petani, organisasi kepemudaan, arisan dan pintu masuk. Bicara dapat berupa cara atau keahlian berbicara, baik yang diperoleh berdasarkan berkah karakteristik(kemampuan) atau melalui bakat khusus. Keahlian berbicara bukanlah sekedar berbicara dengan mudah, tanpa pertimbangan atau substansi yang jelas, melainkan atau mungkin kemampuan berbicara dan menyampaikan wacana yang ringkas, jelas, singkat dan bermakna. Pembicaraan tingkat lanjut mencakup ingatan yang kuat, kekuatan kreatif dan kreatif yang luar biasa, prosedur ekspresi yang tepat, dan kendali atas pembuktian dan penilaian yang tepat. Teknik politik dalam pengambilan keputusan sangat penting sebagai bagian dari pengaruh, namun

keterampilan moral juga penting.

Tingkat kemenangankomunikasi politik dapat diukur dari dampak yang ditimbulkan olehpembicaraan yang dilakukan. Pembicaraan juga harus dapat diandalkan, disertai dengan pemilihan kata dan nada yang sesuai dengan alasan, ruang, waktu, keadaan dan lawan bicara. Aristoteles dan Cicero adalah nama-nama yang paling sering disebutkan di antara sekian banyak tokoh atau cendekiawan. Akar dari konsep pembicaraan adalah pengaruh. Pengertian pengaruh adalah: (1) Tindakan mengubah sikap dan perilaku seseorang melalui ucapan/tulisan, (2) upaya menyampaikan sudut pandang modern, dan (3) upaya sadar untuk mengubah keadaan pikiran, keyakinan, dan perilaku seseorang melalui penyampaian pesan (Sutrisno, 2015: 70). Intinya, ini adalah serangkaian latihan yang tersusun, penting dan strategis. Gunanya untuk membentuk dan menanamkan kepercayaan, pola pikir, keyakinan, pengenalan dan perilaku pemilih. Strategi politik adalah teknik atau strategi yang digunakan untuk mencapai kesempurnaan politik.

Pada penelitian ini opini publik adalah dampak yang ditimbulkan dari komunikasi politik untuk pencitraan partai politik dan calon legislatif pada pemilu 2024 di Kabupaten Banyuwangi. Opini publik yang bersifat positif adalah tujuan dari pencitraan partai politik dan caleg untuk memperoleh dukungan pada kegiatan pemilu. Peran ini sifatnya adalah umum sehingga cukup mudah untuk kita pahami. Dengan adanya peran tersebut maka kita bisa melihat bahwa opini publik memang bisa memberikan pengaruh yang nyata (Heryanto: 2012). Teknik politik sangatlah penting bagi sebuah partai politik. Tanpa prosedur politik, perubahan jangka panjang tidak dapat dicapai. Komunikasi politik adalah sebuah strategi yang memungkinkan partai politik dan kandidat yang mempunyai otoritas untuk membangun hubungan dengan masyarakat terbuka. Prosedur ini digunakan untuk membantu membangun gambaran positif sekaligus memperluas pemahaman politik.

SIMPULAN

Dalam upaya mencari strategi komunikasi politik bagi partai politik dan calon yang mempunyai otoritas dalam pengambilan keputusan kewilayahan banyuwangi tahun 2024 dalam Peraturan Daerah Banyuwangi, khususnya di daerah penunjukan (DAPIL) V yang meliputi Daerah Cluring, Lokal Gambiran dan Lokal Tegalsari. Penelusuran dan pengumpulan informasi dilakukan selama kurang lebih tiga bulan, tepatnya pada bulan Februari hingga April. Selama proses pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis mengidentifikasi beberapa kota yang mewakili setiap kecamatan di wilayah tersebut. Pengertian dan Makna Komunikasi Politik dalam Gambaran Partai Politik dan Calon Pengambil Keputusan Resmi 2024 di Pejabat Banyuwangi. Secara umum, komunikasi politik diatur dalam dua sudut pandang yang berbeda, yaitu komunikasi khusus di satu sisi dan pendekatan di sisi lain, yang kemudian digabungkan dalam satu arah. Permasalahan Legislatif Secara etimologis, isu legislatif berasal dari kata polis yang berarti negara kota pada zaman Yunani kuno. Dalam penyempurnaannya, ada beberapa cara untuk memahami permasalahan perundang-undangan (Syarbaini, S:2021).

1. Pengertian dan definisi komunikasi politik dalam Pencitraan Partai Politik dan Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi Pada umumnya menempatkan komunikasi politik dari dua sisi yang terpisah yaitu komunikasi di satu sisi dan politik di sisi lain kemudian dipadukan dalam satu pengertian. Politik Secara etimologis, politik berasal dari kata polis yang berarti negara kota pada zaman Yunani kuno. Dalam perkembangannya terdapat beberapa pengertian tentang politik (Syarbaini, S:2021). Bentuk komunikasi politik yang lazim dilakukan oleh partai politik dan calon otoritatif untuk menggambarkan partai politik dan calon otoritatif dalam pengambilan keputusan wilayah pasca konflik tahun 2024 dalam Peraturan Daerah Banyuwangi antara lain:
 - Pembentukan pengumuman

- Mengumumkan di media sosial dan media arus utama
 - Komunikasi sosial yang umum secara lugas dalam kelompok masyarakat
 - Melaksanakan alamat atau komunikasi massa.
2. Maksud dari komunikasi politik adalah membuat gambaran dengan menetapkan suatu rencana yang disusun secara jelas. Agenda publik dapat membentengi sesuatu yang dianggap vital oleh produsen pilihan terbuka (open motivasi). Pakar hubungan terbuka harus melihat media sebagai kaki tangan dalam menyebarkan data tentang organisasi. Upaya ini disebut promosi, yaitu pesan-pesan khusus yang disusun, diaktualisasikan, dan disebar oleh media massa untuk memenuhi antarmuka terbuka tanpa membayar media tersebut. Salah satu tujuan komunikasi politik lainnya adalah membangun gambaran terbuka yang positif. Gambaran politik dibentuk berdasarkan data yang diperoleh secara terbuka, baik secara lugas maupun melalui media politik, termasuk media massa yang berfungsi menyampaikan pesan-pesan politik dan realitas bersama.

Gambaran politik juga dikaitkan dengan susunan anggapan terbuka, karena pada dasarnya anggapan terbuka dibangun melalui gambaran politik, dan gambaran politik diwujudkan sebagai hasil kognitif komunikasi politik. Partai sebagai organisasi politik memerlukan terciptanya gambaran partai yang positif. Gambaran positif tersebut dapat diungkapkan melalui sikap terhadap berbagai peristiwa politik dengan menyampaikan kerinduan politik yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pemilih. Gambaran politik erat kaitannya dengan sosialisasi politik, karena gambaran politik dibentuk melalui persiapan pembelajaran politik baik secara langsung maupun melalui keterlibatan. Sebagaimana dapat diketahui, terdapat efek komunikasi politik yang sebenarnya berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial. Komunikasi politik merupakan hal yang mungkin akan menjadi sesuatu yang tidak memberikan

minat bagi beberapa orang. Bentuk komunikasi politik yang lazim dilakukan oleh partai politik dan calon otoritatif untuk menggambarkan partai politik dan calon otoritatif dalam pengambilan keputusan wilayah pasca konflik tahun 2024 dalam Peraturan Daerah Banyuwangi antara lain:

- Pembentukan pengumuman
 - Mengumumkan di media sosial dan media arus utama
 - Komunikasi sosial yang umum secara lugas dalam kelompok masyarakat
 - Melaksanakan alamat atau komunikasi massa.
3. Dapat kita lihat, terdapat dampak-dampak komunikasi politik yang sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan masyarakat. Komunikasi politik merupakan sesuatu yang mungkin kurang menarik bagi sebagian individu. Bagaimanapun, media politik masih mempunyai pengaruh. Siap membedakan apa saja yang langsung atau tidak langsung terpengaruh oleh komunikasi politik. Berikut ini adalah pengaruh media politik terhadap gambaran partai politik dan calon kepala daerah dalam pengambilan keputusan wilayah Banyuwangi 2024:
- a. Dampak media yang terkoordinasi dan tidak langsung.
 - b. Anggapan terbuka terhadap partai politik dan calon yang mengambil keputusan administratif.
 - c. Dampak terhadap perilaku memilih.
- Pada penelitian Strategi komunikasi politik dalam Pencitraan Partai Politik dan Calon Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banyuwangi khususnya di daerah pemilihan (DAPIL) V, yang meliputi Kecamatan Cluring, Kecamatan Gambiran dan Kecamatan Tegalsari. Terdapat temuan temuan baru dari tiga pokok pembahasan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Dari hasil penelitian ini dapat penulis sarankan bahwa dalam proses pencitraan politik sangat membutuhkan strategi yang tepat. Salah satunya adalah komunikasi politik untuk membentuk opini publik yang mengarahkan perilaku pemilih atau

masyarakat untuk memberikan dukungan dan simpati untuk kepentingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, 2000, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alie, Marzuki, (2010), *Pemasarn Politik Dan Politik Kepartaian Di Indonesia, Kajian Pemilihan Umum Tahun 2009 di Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, Desertasi Doctor, Universiti Utara, Malaysia.
- Arifin, Anwar. 2006. *Pencitraan dalam Politik: Strategi Pemenagan Pemilu dalam Persepektif Komunikasi Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Bartels, L. 1988. Issue voting under uncertainty: an empirical test. *American Journal of Political Science*, (30), p.709 -728.
- Budiardjo, Miriam. 2005. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Universitas terbuka.
- Butterick, Keith. 2012. *Pengantar Public Relations Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Downs, A. 1957. *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper-Row.
- Firmansyah. 2011. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Parta Politik: Komunikasi dan Positioning Idiologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Heryanto, gun gun, Zatkasy, Irwa. 2012. *Public Relations Politik*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Hasan, K. (2009). *Komunikasi politik dan pecitraan (analisis teoritis pencitraan politik di Indonesia)*. *Jurnal Online Dinamika fisip Unbara Palembang*, volume 2 Nomor 1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kaid, Lynda Lee & Christina Holtz- Bacha, 2008. *Encyclopedia of Political Communication*. Volume 1 & 2. California: SAGE Publication.
- Kantaprawira, Rusadi. 1994. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Kriyantono, Rachmat. 2020. *Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
- Kriyantono, Rachmat. 2021. *Best Practice Humas (Public Relations) Bisnis dan Pemerintah*.
- Lampe, I. (2014). Identitas etnik dalam komunikasi politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(3), 299-313.
- Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (ed), 1993, *Indonesia dan Komunikasi Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Muchtar, K., Sunan, U., & Djati Bandung, G. (2016). *Komunikasi politik dan pembentukan citra partai*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(2), 136-147.
- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pimay, A. (2023). *Strategi Komunikasi Politik Anggota Legislatif Terpilih Partai Kebangkitan Bangsa Pada Pemilu 2019 di Salatiga*. *Jurnal Kopis: Kajian Penelitian dan Pemikiran Komunikasi Penyiaran Islam*, 5(2), 96-106.
- Pujileksono, S. (2015). *Metode penelitian komunikasikualitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Putra, I. G. N. (2014). Konteks historis praktek humas di indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(3), 178-190.
- Rosyidi, A. M. (2017). Model dan Strategi Pembelajaran Diklat. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 5(1), 100-111.
- Saputra, R. T. (2017). Sistem Kaderisasi Dan Penetapan Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu 2009 (Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara). *Jurnal Universitas Mulawarman*, 2(1), 1829-1841.
- Saraswati, dkk. 2019. "Kegiatan Hubungan Media pada Direktorat Komunikasi Publik di Universitas Padjajaran". *Profesi Humas*, 3(2):202-218.
- Surya Dewi. I Putu Desak. 2022 "Peran Humas Universitas Udayana Dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik" Tesis. Denpasar.
- Sutrisno, I., & Wiendijarti, I. (2015). Kajian retorika untuk pengembangan

pengetahuan dan ketrampilan berpidato. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 70-84.

Syahrial Syarbaini 2021. "Teori, Media Dan Strategi Komunikasi Politik". Program Ilmu Komunikasi ESA UNGGUL Press

Syahputra, Iswandi. 2018. "Strategi Media Relations Perusahaan Pertambangan Timah dan Agenda Setting Media di Bangka Belitung". *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1):91- 105.